
FAKTOR-FAKTOR PENCEGAHAN *FRAUD TENDENCY* DI PEMERINTAHAN DESA

I Wayan Yogi Pandita¹

I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra²

I Made Sudiartana³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar

email: yogipandita56@gmail.com

Abstract

Fraud / cheating is a general term, and includes all kinds of ways that can be used with certain shrewdness, chosen by an individual, to get benefits from other parties by making a wrong representation. This study aims to test empirically the effect of the suitability of compensation, the effectiveness of internal control, organizational ethical culture, compliance with village rules, professionalism of positions in preventing fraud. The sample of this study was 128 samples taken from 64 villages throughout Gianyar Regency. Determination of the sample using purposive sampling method where the village head and treasurer as respondents. The analytical tool used is multiple linear regression analysis, by testing the hypothesis test statistical t. The results of this study indicate that the effect of suitability of compensation, effectiveness of internal controls, organizational ethical culture, compliance with village rules, professionalism of positions has a significant positive effect in preventing fraud.

Keywords: *Fraud tendency, suitability of compensation, effectiveness of internal control, organizational ethical culture, compliance with village rules, professionalism of positions.*

PENDAHULUAN

Accounting fraud tendency atau kecenderungan kecurangan akuntansi telah mendapatkan perhatian khusus dari berbagai pihak. Sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, dana desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah Rp 186 triliun. Dana ini sudah disalurkan ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, dana desa yang berlimpah tersebut rawan praktik korupsi. Berdasarkan hasil pemantauan Indonesia *Corruption Watch* sejak tahun 2015 hingga Semester I 2018, kasus korupsi dana desa

mengalami peningkatan dari tahun ketahun.

Tercatat sedikitnya sudah ada 181 kasus korupsi dana desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar," kata peneliti ICW. Sementara, pada 2017, korupsi dana desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. "Sementara pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang semuanya menjadikan anggaran desa sebagai objek korupsi," kata Egi. Dari segi pelaku, kepala desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi dana desa.

Pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang kepala desa menjadi tersangka. "Total hingga saat ini sedikitnya ada 141 orang kepala desa tersangkut kasus korupsi dana desa," kata Egi. Selain kepala desa yang menjadi aktor, ICW mengidentifikasi potensi korupsi yang dapat dilakukan oleh beberapa aktor lain, yaitu perangkat desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri kepala desa. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sehingga potensi penyuntatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut.

Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Klungkung, Jembrana dan Denpasar yang melibatkan Kepala Desa, menunjukkan bahwa Kepala Desa divonis dua tahun penjara dan denda lima puluh juta rupiah melakukan tindak pidana korupsi dana desa yang terhimpun dari beberapa kegiatan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Alokasi Dana Desa ada pula di desa Selemadet Barat melibatkan Bendahara Desa, dan temuan BPK atas laporan pengelolaan keuangan dana desa di mana pelaporan yang tidak akurat, penggunaan tidak sesuai prioritas, pendampingan tidak memadai, bukti SPJ tidak memadai pada daerah Gianyar. Bentuk korupsi yang paling banyak terjadi di desa yaitu penggelapan dana, penyalahgunaan anggaran dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah desa menunjukkan bahwa *accounting fraud tendency* dapat terjadi di sektor

swasta atau pemerintahan termasuk desa. Penelitian ini menggunakan variabel kesesuaian kompensasi, keefektifan pengendalian internal, budaya etis organisasi, kepatuhan aturan desa, dan profesionalitas atas jabatan yang dapat meminimalisir terjadinya *accounting fraud tendency*.

Accounting fraud tendency dapat diminimalisasi dengan memberikan kompensasi yang sesuai kepada pegawai, melakukan keefektifan pengendalian internal, membentuk budaya etis pada organisasi, penerapan ketaatan aturan pengelolaan dana desa, dan profesionalitas atas jabatan. Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi pengelola keuangan desa selaku penanggung jawab pengelola keuangan desa dan penyusunan laporan keuangan desa. Pengelola keuangan desa terdiri dari kepala desa selaku pemegang kekuasaan dan penanggung jawab pengelolaan keuangan desa serta dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari sekretaris desa, bendahara desa, dan kepala seksi. Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah merupakan sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Jika sistem pengendalian internal yang ada di pemerintah desa dapat diterapkan dengan baik, maka peluang terjadinya *accounting fraud tendency* dapat diminimalisir. Budaya etis organisasi pada pemerintah desa dapat mempengaruhi kemungkinan terjadinya *accounting fraud tendency*. Pemerintah desa merupakan organisasi yang kental akan budaya dan kearifan lokal. Pelaporan keuangan dan pengelolaan dana desa diatur dalam Peraturan

Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh kepala desa dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang terdiri dari unsur perangkat desa. Akuntansi desa merupakan pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa.

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini apakah kesesuaian kompensasi, efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kepatuhan aturan desa, dan profesionalitas jabatan berpengaruh positif dalam mencegah *accounting fraud tendency*?. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh kesesuaian kompensasi, efektifitas pengendalian internal, budaya etis organisasi, kepatuhan aturan desa, dan profesionalitas jabatan dalam mencegah *accounting fraud tendency*.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Fraud Pentagon Theory

Teori *fraud* pentagon atau disebut juga dengan *crowe's fraud pentagon theory* merupakan perluasan dari model *fraud triangle* yang dikembangkan oleh Donald Cressey. Donald Cressey menyimpulkan hasil risetnya bahwa *fraud* memiliki tiga sifat umum yang hadir pada saat *fraud* terjadi yaitu insentif atau tekanan untuk melakukan *fraud* (*pressure*), adanya peluang atau kesempatan untuk melakukan *fraud* (*opportunity*), selanjutnya adanya dalih untuk membenarkan tindakan *fraud* (*rationalization*). Tiga sifat umum tersebut

menjelaskan sebab seseorang melakukan kecurangan. *Fraud triangle* banyak membantu mengidentifikasi kecurangan tetapi tidak semua situasi. Kemudian Crowe's mengembangkan model *fraud* menjadi lima elemen yaitu *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*, *competence*, *arrogance* yang kemudian dinamakan dengan teori *fraud* pentagon.

Teori Atribusi

Teori yang dikembangkan oleh Fritz Heider ini mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan sesuatu peristiwa, alasan, atau sebab perilakunya. Pada dasarnya teori ini menyarankan bahwa jika seseorang mengamati perilaku seseorang individu, orang tersebut berusaha menentukan apakah perilaku itu disebabkan oleh faktor internal atau eksternal.

Kesesuaian Kompensasi Terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Kesesuaian kompensasi berkaitan dengan unsur teori *fraud* pentagon untuk elemen tekanan (*pressure*) yaitu, merupakan motivasi yang ada pada diri seseorang untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan karena adanya tekanan yang dirasakan seperti tekanan keuangan, tekanan untuk melakukan kejahatan, tekanan terkait pekerjaan, dan tekanan lainnya. Dewi (2018) menemukan bahwa keadilan dalam instansi pemerintah dapat dilihat berdasarkan kompensasi yang diterima pegawai, apabila kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang diberikan maka akan memotivasi pegawai untuk berperilaku curang (*fraud*). Kompensasi dapat menentukan motivasi kerja seorang pegawai dalam kinerjanya karena berkaitan dengan kesejahteraan kehidupan pegawai. Jika pegawai merasa kompensasi yang diterima sesuai dan kesejahteraan terpenuhi maka kecenderungan untuk melakukan *accounting fraud tendency* kecil. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam hipotesis sebagai berikut:

H₁: Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dalam mencegah *accounting fraud tendency*.

Keefektifan Pengendalian Internal Terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Seseorang dapat melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dikarenakan adanya kesempatan yang memberikan peluang untuk melakukan tindakan kecurangan. Menurut Zimbelman (2014:360) ada sedikitnya enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan seseorang melakukan kecurangan dalam sebuah organisasi yaitu: Kurangnya pengendalian yang mencegah atau mendeteksi perilaku kecurangan, Ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja, Kegagalan untuk memberikan sanksi tegas terhadap perilaku kecurangan, Kurangnya akses terhadap informasi, Pengabaian, sikap apatis, dan tidak adanya kapasitas yang sesuai, dan Kurangnya upaya melakukan jejak audit.

Kesempatan (*opportunity*) dapat terjadi karena lemahnya pengendalian intern dari organisasi sehingga dapat memberikan celah untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan. Dewi (2017) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk dapat meminimalisasi tindakan kecurangan adalah dengan peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (*fraud*) sangat besar, sebaliknya jika pengendalian internal kuat maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diminimalisasi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam hipotesis sebagai berikut:

H₂: Efektifitas pengendalian internal berpengaruh positif dalam mencegah *accounting fraud tendency*.

Budaya Etis Organisasi Terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Rasionalisasi menjadi elemen penting dalam terjadinya *fraud*, di mana pelaku *fraud* selalu mencari pembenaran secara rasional untuk membenarkan perbuatannya. Adanya suatu

sikap, karakter atau seperangkat nilai-nilai etika yang memungkinkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam suatu lingkungan yang memberikan mereka tekanan yang cukup besar sehingga menyebabkan mereka membenarkan pelaporan keuangan yang tidak benar tersebut.

Budaya etis organisasi merupakan sikap dan tindakan yang ada pada diri pegawai yang dapat membentuk budaya organisasi dan menunjukkan karakteristik kebiasaan pada organisasi tersebut yang membentuk persepsi bagi setiap karyawan. Jika tindakan kecurangan yang terjadi pada pemerintah desa dianggap budaya yang biasa dilakukan oleh pegawai lain, maka seorang pegawai akan menganggap tindakan yang dilakukan merupakan hal biasa dan apabila setiap individu dalam organisasi memiliki etika yang kuat maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan perusahaan seperti tindakan kecurangan (*fraud*). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2017) Budaya etis organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*) akuntansi.. Penelitian ini didukung dengan penelitian Pramita (2017) yang menyatakan bahwa budaya etis manajemen berpengaruh positif terhadap kecurangan. Hal ini menunjukkan semakin baik budaya yang diterapkan oleh pemerintah desa maka dapat mengurangi terjadinya *accounting fraud tendency* di sektor pemerintahan. Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam hipotesis sebagai berikut:

H₃: Budaya etis organisasi berpengaruh positif dalam mencegah *accounting fraud tendency*.

Ketaatan Aturan Akuntansi Desa Terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Crowe mendefinisikan kompetensi (*competence*), kemampuan karyawan untuk mengesampingkan pengendalian internal, mengembangkan strategi penyembunyian yang

canggih, dan mengendalikan situasi sosial demi keuntungannya dengan menjual kepada orang lain. Menurut Wolfe dan Hermanson fraud tidak akan terjadi tanpa keberadaan orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Pengawasan lemah memberikan kesempatan bagi seseorang untuk melakukan fraud dan orang tersebut merasionalisasikan perilaku fraud-nya. Namun, orang tersebut harus memiliki kemampuan untuk mengenali peluang sebagai sebuah kesempatan untuk mengambil keuntungan tersebut. Widiutami (2017) Bahwa semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, maka semakin rendah *accounting fraud tendency* yang dapat terjadi dalam perusahaan. Jika aturan akuntansi atau pengelolaan keuangan pada pemerintah desa tidak ditaati dengan baik, hal ini akan memberikan kesempatan atau peluang terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan kedalam hipotesis sebagai berikut:

H4: Kepatuhan peraturan desa berpengaruh positif dalam mencegah *accounting fraud tendency*.

Profesionalisme Jabatan Terhadap *Accounting Fraud Tendency*

Profesionalitas jabatan memproksikan elemen atau unsur pada fraud pentagon theory berupa sifat arogansi. Menurut Crowe, kesombongan atau kurangnya hati nurani adalah sikap superioritas dan hak atau keserakahan dari orang yang percaya bahwa pengendalian internal tidak secara pribadi diterapkan. Sebuah studi oleh *Committee of Sponsoring Organisations* (COSO) telah menemukan bahwa 70% kecurangan memiliki profil yang menggabungkan tekanan dengan kesombongan atau keserakahan.

Dalam *theory white collar crime* disebutkan bahwa satu kejahatan berdasarkan pada struktur social dan tingkat ekonomi tinggi dimana tindak kejahatan tersebut mengacu kepada petinggi-petinggi suatu perusahaan atau instansi. Sama halnya dengan profesionalitas auditor dalam mencegah *fraud* yang merealisasikannya dengan keahlian untuk melaksanakan tugas

sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Jadi semakin profesionalisme seseorang dalam menyadari bidangnya dan jabatannya maka semakin sedikit kesempatan untuk melakukan tindakan. Berdasarkan uraian ini maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₅: Profesionalisme jabatan berpengaruh positif dalam mencegah *accounting fraud tendency*.

METODE PENELITIAN

Definisi operasional variabel

Kesesuaian Kompensasi adalah merupakan suatu yang karyawan dapatkan sebagai pengganti kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan tentang pencapaian tiga golongan. Budaya etis organisasi adalah suatu sistem berbagai arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi lain. Kepatuhan aturan akuntansi merupakan kepatuhan seorang akuntan atau pengelola keuangan terhadap standar dan kebijakan akuntansi yang telah diatur. Profesionalisme Jabatan adalah seseorang yang memiliki profesionalisme senantiasa mendorong dirinya untuk mewujudkan aktivitas kerja yang professional. Pencegahan *fraud* merupakan pilar yang memuat perangkat-perangkat untuk ditujukan dalam mengurangi potensi terjadinya *fraud*.

Metode Penentuan Sampel

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah karyawan seluruh Kantor Desa daerah Gianyar yang berjumlah 64 desa dan kantor. Berdasarkan jumlah populasi yang besar, maka penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Data penelitian ini dikumpulkan dengan kuesioner. Dalam penelitian ini, penulis mengambil masing-masing 2 sampel di setiap kantor desa Jumlah sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah 64 Kantor Desa , dimana tiap Kantor Desa diambil 2 responden sehingga berjumlah 128 responden yang terdiri dari 64 Kepala Desa dan 64 Bendahara.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda yang sebelumnya dilakukan uji instrumen dan uji asumsi klasik.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian

Hasil Instrument yang dipakai dalam penelitian ini sudah memenuhi unsur validitas dan reliabilitas sehingga layak digunakan dalam penelitian. Terkait hasil analisis regresi linear berganda ini, telah memenuhi asumsi secara statistik sehingga model layak untuk digunakan. Berikut adalah hasil analisis dari model penelitian:

Tabel 1

Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
		1	(Constant)	-25,250		
	Kesesuaian Kompensasi	0,176	0,073	0,155	2,407	0,018
	Pengendalian Internal	0,177	0,068	0,164	2,600	0,011
	Budaya Etis Organisasi	0,406	0,162	0,169	2,511	0,013
	Kepatuhan Aturan Akuntansi	0,313	0,124	0,173	2,532	0,013
	Profesionalisme Jabatan	0,941	0,131	0,450	7,157	0,000
R		: 0,826				
R Square		: 0,683				
Adjusted R Square		: 0,669				
F hitung		: 49,034				
Sig. F		: 0,000				

Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,669 sehingga dapat dihitung persentase kontribusi kesesuaian kompensasi, pengendalian internal, budaya etis organisasi, kepatuhan aturan akuntansi dan profesionalisme jabatan terhadap pencegahan *fraud tendency* sebesar $0,669 \times 100\% = 66,9\%$ dengan sisa 33,1% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian.

Berdasarkan tabel 1 diperoleh signifikan uji F yakni $0,000 < 0,05$. Hasil ini mempunyai arti bahwa ada pengaruh signifikan antara kesesuaian kompensasi, pengendalian

internal, budaya etis organisasi, kepatuhan aturan akuntansi dan profesionalisme jabatan terhadap pencegahan *fraud tendency*.

Persamaan regresi linear berganda disajikan sebagai berikut:

$$Y = -25,250 + 0,176X_1 + 0,177X_2 + 0,406X_3 + 0,3133 X_4 + 0,941 X_5$$

Pembahasan Penelitian

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Pencegahan *Accounting Fraud Tendency*

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kesesuaian kompensasi terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,018 kurang dari 0,05 ($0,018 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,176 bernilai positif. Hasil ini mempunyai arti bahwa kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency*. Dewi (2018) menyatakan bahwa pemberian kompensasi yang sesuai diharapkan dapat mengurangi terjadinya *accounting fraud tendency*. Seseorang yang melakukan *accounting fraud tendency* dikarenakan perasaan bahwa adanya ketidaksesuaian antara kompensasi dengan kinerja, selain itu kompensasi yang didapat dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Jika kompensasi yang diberikan sesuai dengan kinerja maka kemungkinan tindak kecurangan dapat ditekan.

Pengaruh Pengendalian Internal terhadap Pencegahan *Accounting Fraud Tendency*

Berdasarkan hasil analisis pengaruh pengendalian internal terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,011 kurang dari 0,05 ($0,011 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,177 bernilai positif. Hasil ini mempunyai arti bahwa pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency*.

Kesempatan dapat terjadi karena lemahnya pengendalian intern dari organisasi sehingga dapat memberikan celah untuk melakukan sebuah tindakan kecurangan. Dewi

(2017) menyatakan bahwa salah satu upaya untuk dapat meminimalisir tindakan kecurangan adalah dengan peningkatan efektivitas sistem pengendalian intern. Jika pengendalian internal suatu organisasi lemah maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan (*fraud*) sangat besar, sebaliknya jika pengendalian internal kuat maka kemungkinan terjadinya kesalahan dan kecurangan bisa diminimalisir.

Pengaruh Budaya Etis Organisasi terhadap Pencegahan *Accounting Fraud Tendency*

Berdasarkan hasil analisis pengaruh budaya etis organisasi terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 kurang dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,406 bernilai positif. Hasil ini mempunyai arti bahwa budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency*.

Jika tindakan kecurangan yang terjadi pada pemerintah desa dianggap budaya yang biasa dilakukan oleh pegawai lain, maka seorang pegawai akan menganggap tindakan yang dilakukan merupakan hal biasa dan apabila setiap individu dalam organisasi memiliki etika yang kuat maka hal tersebut dapat mencegah terjadinya perbuatan yang tidak diinginkan sehingga dapat merugikan perusahaan seperti tindakan kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Kepatuhan Aturan Akuntansi terhadap Pencegahan *Accounting Fraud Tendency*

Berdasarkan hasil analisis pengaruh kepatuhan aturan akuntansi terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,013 kurang dari 0,05 ($0,013 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,313 bernilai positif. Hasil ini mempunyai arti bahwa kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency*.

Widiutami (2017) menjelaskan bahwa semakin manajemen perusahaan taat pada aturan akuntansi, maka semakin rendah *accounting fraud tendency* yang dapat terjadi dalam perusahaan. Jika aturan akuntansi atau pengelolaan keuangan pada pemerintah desa tidak ditaati dengan baik, hal ini akan memberikan kesempatan atau peluang terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Profesionalisme Jabatan terhadap Pencegahan *Accounting Fraud Tendency*

Berdasarkan hasil analisis pengaruh profesionalisme jabatan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 kurang dari 0,05 ($0,000 < 0,05$) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,941 bernilai positif. Hasil ini mempunyai arti bahwa profesionalisme jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency*.

Dalam *teory white collar crime* disebutkan bahwa satu kejahatan berdasarkan pada struktur social dan tingkat ekonomi tinggi dimana tindak kejahatan tersebut mengacu kepada petinggi-petinggi suatu perusahaan atau instansi. Sama halnya dengan profesionalitas auditor dalam mencegah *fraud* yang merealisasikannya dengan keahlian untuk melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya, melaksanakan suatu tugas atau profesi dengan menetapkan standar baku di bidang profesi yang bersangkutan dan menjalankan tugas profesinya dengan mematuhi etika profesi yang telah ditetapkan. Jadi semakin profesionalisme seseorang dalam mnyadari bidangnya dan jabatannya maka semakin sedikit kesempatan untuk melakukan tindakan *fraud tendency*.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai

berikut:

1. Kesesuaian kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa pada Kantor Desa seluruh Gianyar.
2. Pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa pada Kantor Desa seluruh Gianyar.
3. Budaya etis organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa pada Kantor Desa seluruh Gianyar.
4. Kepatuhan aturan akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa pada Kantor Desa seluruh Gianyar.
5. Profesionalisme jabatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan *accounting fraud tendency* di pemerintahan desa pada Kantor Desa seluruh Gianyar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terdapat saran yang dapat dipertimbangkan oleh beberapa pihak sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Desa penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pertanggungjawaban, pengawasan dan tindakan yang akan dilakukan. Selain itu agar selalu mempertimbangkan kesejahteraan karyawan, pengendalian internal, budaya etis yang baik, kepatuhan aturan akuntansi desa, dan profesionalitas atas jabatan agar tindak kecurangan dapat ditekan.
2. Bagi peneliti selanjutnya di lihat dari keterbatasan penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh melalui kuesioner, yaitu kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara peneliti dan responden karena responden dan peneliti tidak dapat saling mengklarifikasi pertanyaan atau pernyataan. Oleh karena itu penelitian tentunya menjadi lebih representatif apabila mengkombinasikan dengan metode wawancara sehingga persepsi

responden atas pertanyaan atau pernyataan dapat diketahui secara mendalam. Sampel adalah pemerintahan desa yang ada di Kabupaten Gianyar sehingga, hasil dan kesimpulan penelitian ini tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas wilayah cakupan sampel yang sehingga diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Diperlukan penambahan variabel yang dapat meminimalisasi terjadinya kecenderungan *fraud* seperti adanya pengakuan atas kinerja, efektivitas fungsi auditor internal, sistem informasi akuntansi yang mempengaruhi pencegahan *fraud*, serta variabel lain dari segi keprilakuan dan manajerial seperti *locus of control*, *total quality management* dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Dayan, A. 1986. *Pengantar Metode Statistika Jilid II*. LP3S. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Yogyakarta : Badan Penerbit BPF
- Gendro, W. 2011. *Merancang Penelitian Bisnis dengan Alat Analisis SPSS 17.0 & Smart PLS 2.0*. Yogyakarta: Percetakan STIM YKPM.
- Robbins, S. P. 2004. *Perilaku Organisasi jilid 1&2*. Prentice Hall.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zimbelman, M. F. 2014. *Forensic Accounting*. SALEMBA EMPAT.
- Aprilia, A. 2017. Analisis Pengaruh Fraud Pentagon Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan Menggunakan Beneish Model Pada Perusahaan Yang Menerapkan Asean Corporate Governance Scorecard. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 101-132.
- Arifah, A., & Rahmawati, D. 2018. Pengaruh Ketaatan Aturan Akuntansi, Keefektifan Pengendalian Internal, Kesesuaian Kompensasi, Keadilan Prosedural, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi pada Perguruan Tinggi Negeri di Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Profita: Kajian Ilmu*

Akuntansi, 6(4).

- Budiantari, N. N. A., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., & Wahyuni, M. A. 2018. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Profesionalisme Badan Pengawas, dan Moralitas Terhadap Kecenderungan Kecurangan (fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada LPD Se-Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Dewi, N.M. D. M., Yuniarta, G. A., Ak, S. E., & Wahyuni, M. A. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, Dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi Pada Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Jembrana. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Husmawati, P., Septriani, Y., Rosita, I., & Handayani, D. 2017. Fraud Pentagon Analysis in Assessing the Likelihood of Fraudulent Financial Statement (Study on Manufacturing Firms Listed in Bursa Efek Indonesia Period 2013-2016). In *International Conference of Applied Science on Engineering, Business, Linguistics and Information Technology* (pp. 45-51). ICo-ASCNITECH.
- Manik, T., & Kusasi, F. 2019. Kualitas Laporan Keuangan Dan Pencegahan Fraud Di Provinsi Kepri. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Finansial Indonesia*, 3(1), 17-32.
- Megawati, M. H. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Etis Organisasi, dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Fraud Pada Universitas Swasta Di Bandar Lampung (*Doctoral Dissertation*, UNIVERSITAS LAMPUNG).
- Putra, I. P. A. P. E., Eka, P. A. P., & Latrini, M. Y. 2018. Pengaruh Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, Dan Moralitas Pada Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Di Lpd Se-Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 25, 2160.
- Pramita, M. W., Sulindawati, N. L. G. E., Ak, S. E., & Wahyuni, M. A. 2018. Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal, dan Budaya Etis Organisasi Terhadap Terjadinya Fraud (Studi Pada Perusahaan Di Bidang Penjualan Tunai Dan Kredit Di Kecamatan Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).
- Sarpta, R. B. 2018. Analisis Fraud Pentagon dalam Mendeteksi Fraudulent Financial Reporting Menggunakan Beneish M-Score Model (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016).
- Sumbayak, J. S., Anisma, Y., & Hasan, M. A. 2017. Pengaruh Keadilan Organisasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecurangan (Fraud)(Studi Empiris Pada Kantor Cabang Utama Perusahaan Leasing

Di Kota Pekanbaru) (*Doctoral dissertation, Riau University*).

- Tiapandewi, N. K. Y., Suryandari, N. N. A., & Susandya, A. P. G. B. A. 2020. DAMPAK FRAUD TRIANGLE DAN KOMITE AUDIT TERHADAP KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN. *Kumpulan Hasil Riset Mahasiswa Akuntansi (KHARISMA)*, 2(2), 156-173.
- Widiutami, N. P. S., Sulindawati, N. L. G. E., Atmadja, A. T., & SE, A. 2017. Pengaruh Efektivitas Pengendalian Internal, Ketaatan Aturan Akuntansi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (Fraud) Akuntansi (Studi Empiris Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kabupaten Buleleng). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 7(1).
- Wijayanti, P., & Hanafi, R. 2018. Pencegahan Fraud di Pemerintah Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(2), 331-345.
- Yuliani, S. 2018. Pengaruh Perilaku Tidak Etis, Pengendalian Internal dan Budaya Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Instansi Pemerintahan Kab. Pasaman Barat). *Jurnal Akuntansi*, 6(3).